

Kebijakan Ekonomi Biru dan Keberlanjutan UMKM di Kawasan Pesisir

Arum Arupi Kusnindar¹, Siti Khoiriyah², Dhel Juni Pasya³, Bilqis Dwi⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Indonesia; arumkusnindara@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Indonesia; sitikhoiriyah@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Indonesia; dheljunipasya@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Indonesia; bilqisdwi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Blue Economy;
SDGs;
Coastal MSMEs

Article history:

Received 2021-08-14

Revised 2021-11-12

Accepted 2022-01-17

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the blue economy in supporting the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in coastal areas. Referring to the Sustainable Development Goals (SDGs) indicators, this study explores the role of the blue economy in improving social welfare, economic growth, and environmental conservation. This study uses a qualitative method with data collection through in-depth interviews with MSME actors in coastal areas. The data is processed using Nvivo. The analysis shows that the implementation of the blue economy supports various aspects of the SDGs, such as poverty alleviation, job creation, environmental conservation, and improving food security. Business actors around coastal areas are well aware that the sustainability of their business depends on coastal natural conditions so that awareness to preserve the environment is very high. However, challenges related to capital, technology access, and policy support remain major obstacles. Recommendations include strengthening strategic partnerships, training in environmentally friendly technologies, and developing sustainable business models. The results of the study also show the need for closer collaboration between local governments and universities in providing coaching and mentoring. The results of this study provide important insights for policy making and development of blue economy-based MSMEs to support the sustainability of coastal areas.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Arum Arupi Kusnindar

Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Indonesia; arumkusnindara@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebuah kebanggaan menjadi warga negara indonesia yang memiliki garis pantai yang mencapai 95.181 kilometer, dan menjadi negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia. Indonesia diberkahi dengan keberlimpahan sumber daya laut, mendapatkan julukan sebagai negara maritim akibat luasnya wilayah dan kekayaan perairannya. Pada tahun 2020, Indonesia memproduksi 6,43 juta ton hasil perikanan tangkap, yang menempatkannya pada posisi kedua di dunia dalam hal volume produksi perikanan tangkap, setelah China (BPS, 2022).

Namun, kekayaan laut yang sangat besar belum memberikan warga di kawasan pesisir kehidupan yang layak. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) terdapat Di tahun 2021, persentase kemiskinan ekstrem di daerah pesisir tercatat sebesar 4,19 persen, angka ini melampaui rata-rata kemiskinan ekstrem di tingkat nasional yang berada pada 4 persen. Dari total 10,86 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di seluruh negara, sekitar 1,3 juta orang atau 12,5 persen di antaranya berdomisili di area pesisir (Kent & Darmasetiawan, 2023).

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi serta layanan sosial. Seseorang disebut miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 per hari berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP), yang dihitung dengan standar kemiskinan absolut yang berlaku secara internasional. Di Indonesia, ini setara dengan pengeluaran di bawah Rp 10.739 per orang per hari atau Rp 322.170 per orang per bulan. Sebagai contoh, keluarga dengan 4 anggota (ayah, ibu, dan 2 anak) dikategorikan miskin ekstrem jika total pengeluaran mereka di bawah Rp 1.288.680 per bulan (BPS, 2022; Arifin J, 2020).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Kebijakan ekonomi biru, yang menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, memastikan ekosistem laut mendukung perekonomian jangka panjang. UKM di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan pengolahan hasil laut sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya ini. Dengan pengelolaan yang tepat, UKM bisa terus beroperasi tanpa khawatir akan menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Ekonomi biru juga mendorong diversifikasi usaha dan inovasi dalam pemanfaatan laut, seperti budidaya laut, ekowisata, dan energi terbarukan. Diversifikasi ini membuat UKM lebih tangguh menghadapi fluktuasi pasar dan perubahan iklim. Sinergi antara kebijakan ekonomi biru dan pengembangan UKM dapat memperkuat perekonomian, khususnya di wilayah pesisir.

Penelitian terdahulu mengenai peran milenial dalam implementasi ekonomi biru dilakukan oleh Ratnasari (2023) [15] yang menyatakan bahwa Implementasi ekonomi biru akan berpengaruh pada daya saing UMKM di kawasan pesisir. Buku ekonomi biru yang ditulis pane dkk (2024) [12] lebih dalam menunjukkan implementasi ekonomi biru akan menggerakkan aktivitas perekonomian tidak hanya di pesisir tetapi juga pada kawasan lain salah satunya melalui peningkatan daya saing UMKM. Namun, tetap saja banyak kantong-kantong kemiskinan di temukan di daerah pesisir. Sumber daya laut banyak di bawa ke luar pesisir, kawasan pesisir hanya ramai pada saat puncak kunjungan wisata dan tidak jarang fasilitas dan infratruktur kurang memadai di daerah pesisir. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Ekonomi Biru dan Keberlanjutan UMKM di Kawasan Pesisir: Studi Kasus di Lampung. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan yang berfokus pada sektor kelautan. Untuk mewujudkannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berdaya saing global memegang peran kunci. Oleh karena itu, KKP terus mendorong peningkatan kapasitas SDM unggul di berbagai daerah. Ekonomi biru juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yang memastikan kegiatan ekonomi saat ini tidak merusak lingkungan sehingga generasi mendatang tetap dapat menikmati kekayaan alam Indonesia, baik dari darat maupun laut (Fabiola, 2022; Ismail dkk, 2023).

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Tanggamus merupakan penghasil produksi perikanan tangkap terbesar kedua setelah Lampung Timur sebesar 26847 Ton pada tahun 2020. Kecamatan Kotagung merupakan kecamatan yang menyumbang produksi ikan terbesar di Kabupaten Tanggamus sebesar

10.874,91 ton. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di pesisir seluruhnya dilakukan oleh usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal, terutama di wilayah pesisir. Mereka menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung stabilitas ekonomi lokal. Dalam konteks ekonomi biru, UMKM yang bergerak di sektor maritim seperti perikanan, pariwisata bahari, dan pengolahan hasil laut dapat menggerakkan roda ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi ekonomi biru dilakukan dan dampaknya terhadap keberlanjutan UMKM di wilayah pesisir Lampung. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah; a) Bagaimana kebijakan ekonomi biru diimplementasikan oleh pemerintah dan pelaku usaha di wilayah pesisir Lampung? Dan b) Bagaimana pelaku UMKM di wilayah pesisir Lampung memanfaatkan kebijakan ekonomi biru dalam upaya meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka.

2. METODE

Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Jenis wawancara adalah semi terstruktur Wawancara dilakukan melalui prosedur yang sudah di tetapkan. Prosedur dan aturan umum yang perlu diikuti terkait desain wawancara, pertanyaan yang di ajukan, karakteristik narasumber, durasi wawancara, transkripsi dan analisis hasil wawancara (Pahleviannur, M. R et all, 2022). Sample atau selanjutnya di sebut sebagai partisipan sebanyak 5 orang dengan kriteria, 1) Sudah beroperasi lebih dari 2 tahun, 2) lokasi usaha dalam radius 1 Km dari wilayah pantai. Teknik pengambilan sampel menggunakan Snowball Sampling dengan memilih 5 partisipan terlebih dahulu dan dapat ditambahkan jika hasil wawancara dirasa belum mampu menjawab pertanyaan penelitian. Instrumen dalam penelitian adalah seperangkat pertanyaan wawancara yang disusun untuk mengetahui tanggapan narasumber. Instrumen penelitian dan indikatornya disusun berdasarkan Road map of Indonesian Blue Economy yang disusun oleh Kementerian perikanan dan kelautan khususnya pada strategi ketiga tahun 2023 – 2024 mengenai menjadikan kesejahteraan dan kesetaraan para pemangku kepentingan ekonomi biru sebagai langkah menuju transisi yang adil.

Analisis data terdiri dari pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasi kembali bukti-bukti untuk menunjukan proposisi awal suatu penelitian. Teknik analisis data menurut Miles & Huberman dengan proses sebagai berikut:

- 1) Melakukan proses penyaringan data hasil wawancara dengan sebelumnya mengubah hasil wawancara kedalam transkrip tertulis,
- 2) Membuat Kerangka Kode (Nodes) dan Sub Nodes,
- 3) Melakukan Coding dengan memilih bagian transkrip yang relevan dengan Nodes.
- 4) Melakukan analisis data menggunakan Word Frequency Query dan MapTree serta melakukan visualisasi data.
- 5) Melakukan interpretasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desripsi Informan

Informan atau narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 5 UMKM yang membuka usaha di wilayah pesisir dengan profil UMKM disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Nama Informan/Nara sumber	Jenis dan Deskripsi Usaha	Lama Usaha Berdiri	Alamat	
1	Ibu N (nama di samarkan)	Abon Ikan, Kerupuk, Ikan di asinkankan, ikan asap, ikan frozen, bakso ikan dan olahan ikan lainnya	15 Tahun	Pantai Indah	Muara Kota Agung
2	Ibu E (Nama di samarkan)	Warung Makan Olahan Ikan	10 Tahun	Pantai Setia	Tanjung Krui
3	Bapak S (Nama di samarkan)	Penjualan Ikan Segar Partai Besar (pengepul besar)	25 Tahun	Pantai Setia, Krui	Tanjung
4	Bapak A (Nama di samarkan)	Penjualan Ikan segar Partai Kecil (nelayan)	25 Tahun	Pantai Indah	Muara Kota Agung
5	Ibu A (Nama di samarkan)	Warung Kelontong, kebutuhan sehari hari	12 Tahun	Pantai Klara Pesawaran	2,

Tabel di atas menunjukkan profil lima informan/narasumber dalam penelitian ini. Semua informasi merupakan UMKM di sekitar wilayah pesisir dan sudah memiliki usaha lebih dari satu tahun dengan 10 tahun. Dengan usia usaha yang cukup lama mereka memiliki pengalaman yang dapat dibagikan untuk kepentingan penelitian ini. Wawancara pada informan dari Krui dilakukan melalui sambungan telepon sedangkan wawancara informan dari pantai Klara 2 dan Muara Indah dilakukan secara langsung. Durasi setiap wawancara maksimal 60 menit dan dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.

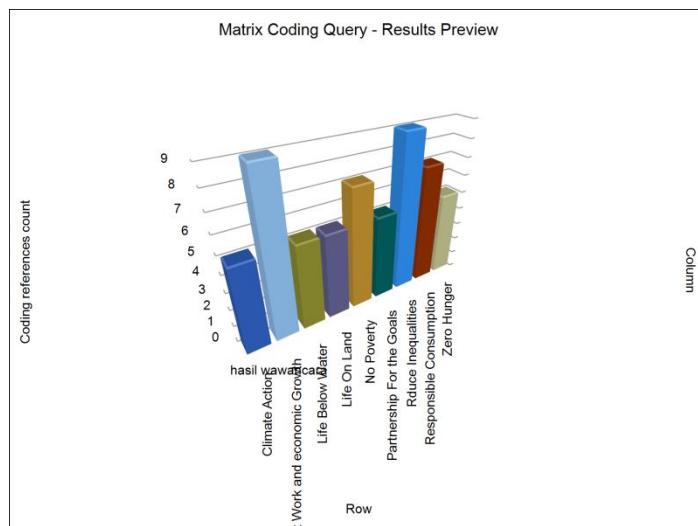
Pembahasan

Hasil wawancara ditulis dalam transkrip dan yang sudah melalui proses editing tanpa mengurangi makna sebenarnya dari jawaban para informan. Hasil wawancara selanjutnya diolah menggunakan Nvivo. Analisis melalui berbagai tahapan yaitu 1) Coding/Nodes. Kode dalam penelitian ini memegang peranan sangat penting dalam proses analisis data. Kode yang digunakan sesuai dengan indikator ekonomi biru yang telah ditentukan. Proses koding menghasilkan kata kunci yang kemudian digambarkan dalam wordcloud dan mind map yang tampak di bawah ini:



Gambar 1. Wordcloud

Salanjutnya dilakukan analisa berdasarkan coding/nodes yang telah di buat dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2

Matrux Coding Analysis

Dari kata kunci yang ada dapat dibuat *mindmap*. Mindmap bertujuan untuk merancang, mengorganisasi, dan memvisualisasikan analisis data secara sistematis, Hasil analisis pada masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) No Poverty (Tanpa Kemiskinan). Indikator ini ditandai dengan dua isu utama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas pendapatan. Data menunjukkan adanya respon yang mencerminkan tingkat keberhasilan usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan dasar. Narasumber terbagi ke dalam tiga kelompok: (1) mereka yang merasa usaha cukup untuk kebutuhan dasar, (2) mereka yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, dan (3) mereka yang sudah mampu menabung. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan mikroekonomi, di mana usaha mikro cenderung rentan terhadap guncangan eksternal, seperti biaya kesehatan yang mendadak (Martinez et.all., 2021). Kelompok yang dapat menabung menunjukkan tanda awal dari mobilitas ekonomi ke atas
- 2) Zero Hunger (Tanpa Kelaparan). Zero hunger ditandai dengan adanya akses secara konsisten pada makanan sehat dan bergizi. Narasumber mengelola usaha berbasis hasil laut, dengan fokus pada distribusi makanan sehat dan terjangkau merupakan salah satu media membuka akses tersebut. Jawaban narasumber mencerminkan adanya pola diversifikasi usaha, seperti pengolahan ikan, distribusi langsung dari nelayan, dan pembukaan warung makan. Diversifikasi usaha membantu memperkuat ketahanan pangan di komunitas pesisir. Usaha berbasis komunitas memainkan peran penting dalam mengurangi kelaparan, sejalan dengan studi oleh FAO pada tahun 2018 yang menekankan pentingnya pendekatan lokal dalam pembangunan ketahanan pangan (Pane, D.D.P dkk. (2021)
- 3) Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Indikator ini ditandai dengan munculnya penciptaan lapangan kerja baru dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Mayoritas narasumber memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja di daerah pesisir. Sebagian besar usaha mempekerjakan penduduk lokal, meskipun skala usaha masih kecil. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan terkait upah yang layak masih perlu diatasi
- 4) Reduced Inequalities (Mengurangi Ketimpangan). Indikator ini ditandai dengan kemampuan implementasi ekonomi biru memunculkan peuang ekonomi bagi warga sekitar dan dukungan pada

- kelompok-kelompok usaha baru. Narasumber menciptakan kontribusi sosial melalui penyediaan lapangan kerja, pengolahan limbah laut menjadi kerajinan, dan mendukung kelompok usaha lokal. Usaha berbasis komunitas yang didukung oleh kelompok ibu-ibu dan pemuda memperlihatkan bagaimana usaha mikro dapat menjadi alat pengurangan ketimpangan sosial. Dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga keuangan dapat memperbesar dampak ini (Sungkawati, 2024)
- 5) Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Indikator ini berkaitan dengan pengelolaan limbah dan daur ulang bahan baku. Praktik pengelolaan limbah organik dan penggunaan sumber daya yang efisien menjadi sorotan utama. Contohnya, sisa ikan digunakan untuk pakan ternak atau kaldu. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya (Suryawijaya, 2024)
 - 6) Climate Action (Perubahan Iklim). Indikator ini berkaitan dengan Pelestarian ekosistem laut dan penggunaan alat yang ramah lingkungan. Pelestarian ekosistem laut merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi biru. Analisis menunjukkan bahwa upaya ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi fondasi keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah pesisir. UMKM yang beroperasi di sektor kelautan, seperti perikanan tangkap, budidaya laut, atau ekowisata bahari, sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut. Praktik ekonomi biru mengutamakan perlindungan keanekaragaman hayati laut untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sedangkan Penggunaan alat ramah lingkungan oleh UMKM merupakan bagian dari climate action untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Kedua aspek ini, yaitu pelestarian ekosistem laut dan penggunaan alat ramah lingkungan, saling mendukung untuk menciptakan UMKM yang lebih berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim
 - 7) Life Below Water (Kehidupan di bawah air). Life Below Water berkaitan dengan aktivitas konservasi terumbu karang dan dukungan nelayan lokal pada kegiatan konservasi wilayah pesisir. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling penting dalam mendukung kehidupan di bawah laut (life below water), karena berfungsi sebagai habitat utama bagi berbagai spesies laut. Analisis menunjukkan bahwa konservasi terumbu karang merupakan komponen kunci dalam penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan. Terumbu karang tidak hanya mendukung keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan ekowisata. Kondisi terumbu karang yang baik meningkatkan hasil tangkapan ikan dan daya tarik wisata bahari. Dukungan nelayan lokal dilakukan dengan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, peran serta nelayan dalam konservasi lahan mangrove dan terumbu karang.
 - 8) Life on Land (Kehidupan darat). Indikator ini berhubungan dengan kebersihan wilayah pesisir dan rehabilitasi lahan kritis. Kebersihan wilayah pesisir merupakan aspek vital dalam mendukung ekonomi biru, terutama karena wilayah pesisir berfungsi sebagai penghubung antara ekosistem laut dan daratan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebersihan wilayah pesisir memengaruhi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan aktivitas UMKM, terutama di sektor perikanan, pariwisata, dan pengolahan hasil laut. Wilayah pesisir yang bersih menciptakan lingkungan yang sehat bagi ekosistem laut, termasuk habitat ikan, moluska, dan spesies lain yang menjadi bahan baku utama bagi UMKM berbasis kelautan. Kebersihan pesisir juga meningkatkan daya tarik pariwisata bahari, sehingga memberi peluang bagi UMKM di sektor pariwisata, seperti penyedia jasa perjalanan, penginapan, atau makanan dan minuman. Rehabilitasi lahan kritis di wilayah pesisir dan sekitarnya juga menjadi perhatian penting dalam penerapan ekonomi biru. Lahan kritis, seperti area mangrove yang rusak atau lahan abrasi, perlu direhabilitasi untuk mendukung keberlanjutan ekosistem daratan dan laut. Mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi, penyerap karbon, dan habitat bagi berbagai spesies laut yang penting untuk UMKM perikanan
 - 9) Partnerships (Kemitraan). Indikator ini berkaitan dengan kemitraan UMKM pesisir dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, Pemerintah, Lembaga pendidikan dan instansi

lain. Serta bagaimana kemitraan tersebut memberikan pelatihan dan permodalan bagi usaha UMKM. Analisis menunjukkan bahwa kemitraan ini memberikan peluang untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui akses pasar, sumber daya, dan kebijakan yang mendukung. Koperasi berfungsi sebagai penghubung antar pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja secara kolektif dalam mengakses bahan baku, teknologi, dan pasar. Pemerintah memberikan dukungan melalui regulasi, program pendampingan, dan infrastruktur yang mendukung implementasi ekonomi biru

Hasil analisis penelitian mengenai hubungan ekonomi biru dan UMKM menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Data yang terkumpul melalui kode dan kata kunci mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi biru dapat diintegrasikan ke dalam praktik UMKM, mendukung berbagai aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa UMKM di wilayah pesisir memberikan peluang penghasilan, baik bagi pemilik usaha maupun pekerja. Stabilitas pendapatan yang dihasilkan, meskipun belum optimal, menunjukkan peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan secara bertahap. Namun, tantangan dalam mengatasi biaya kesehatan dan pendidikan menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan. UMKM juga dapat membantu komunitas pesisir mengakses pangan sehat. Diversifikasi usaha, seperti pengolahan ikan dan pembukaan warung makan, menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kelaparan di tingkat komunitas. menciptakan lapangan kerja baru, terutama di wilayah pesisir dan engurangi ketimpangan sosial melalui penyediaan peluang ekonomi bagi kelompok-kelompok marginal, seperti ibu rumah tangga dan pemuda (Ratnasari, 2023).

Dalam hal perubahan iklim dan konservasi sumber daya laut UMKM di sektor kelautan telah mengadopsi praktik yang mendukung mitigasi perubahan iklim, seperti penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pelestarian ekosistem laut. Konservasi ekosistem laut, terutama terumbu karang, merupakan fokus utama dalam penerapan ekonomi biru di UMKM. UMKM berkontribusi dengan memastikan lingkungan pesisir yang bersih dan mendukung rehabilitasi mangrove yang rusak. Kondisi ini mendukung ekosistem daratan dan laut secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung kepada UMKM, seperti peningkatan hasil tangkapan ikan dan daya tarik wisata.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa UMKM memiliki kontribusi nyata dalam mendukung berbagai tujuan SDGs melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi biru. Hubungan antara indikator SDGs dengan aktivitas UMKM mencerminkan potensi besar untuk menciptakan dampak positif di tingkat lokal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperbesar dampak yang dihasilkan, memastikan keberlanjutan usaha kecil, dan mendukung transformasi ekonomi menuju keberlanjutan global.

REFERENSI

- Arifin, J. Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2).2020. 114-132
- Apriliana, T., Fathonah, A. N., & Ali, M. Blue Economy dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. 2024. 8(1), 512-520
- BPS. Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2022b: Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan. Badan Pus Stat.
- Bădîrcea, R. M., Manta, A. G., Florea, N. M., Puiu, S., Manta, L. F., & Doran, M. D. (2021). Connecting Blue Economy and Economic Growth to Climate Change: Evidence from European Union Countries. *Energies*, 14(15), 4600.

- Dewi, N. L. P. K. (2024, August). Ekonomi biru: strategi pembangunan yang berkelanjutan dan indonesia emas 2045. In Prosiding Seminar Teknologi, Akuntansi, Bisnis, Ekonomi, dan Komunitas (Vol. 4, pp. 418-441).
[https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--diakses pada 20 Maret 2024](https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--diakses-pada-20-Maret-2024)
- Fabiola. Konsep Blue Economy Di Daerah Pesisir. *J Marit*. 2022. 12(2), 52–59
- Hansen, S. Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*. 2020. 27(3), 283.
- Hidayat, N. K., Sari, D. L., & Pramudita, D. (2024). Prospek Ekonomi Biru untuk Mendukung Capaian Sustainable Development Goal (SDG) 14. Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia, 99.
- Ismail, R. M., Arbakala, J., Jumadi, J., & Soedrijanto, A. Integrated Empowerment Strategy of Indigenous Communities and Local Communities Based on the Blue Economy in East Fakfak District, Fakfak District. *Agrikan Jurnal Agribisnis Perikanan*, 2023. 16(1), 109-117.
- Kent, M., & Darmasetiawan, N. K. Kepemimpinan Transformasional Generasi Milenial Dalam Menghadapi Kesenjangan Lintas Generasi Di Perusahaan Blue Ekonomi Jawa Timur. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 2023. 10(3), 2431-2444
- Kusnindar, A. A., & Arifin, A. (2018). Profiling UKM Di Kabupaten Pringsewu Sebagai Basis Menciptakan Model Pemberdayaan UKM Yang tepat Sasaran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 9(1), 1-17.
- Martínez-Vázquez, R. M., Milán-García, J., & de Pablo Valenciano, J. (2021). Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends. *Environmental Sciences Europe*, 33(1), 61.
- Mulyanie, E. Implementasi Konsep Blue Economy di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 14: Life Below Water. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*. 2023. 7(2), 79-87.
- Nurhayati, S. "Blue and Economy Policy" and Their Impact to Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2015. 12(2), 37-42.
- Primantika, D. W., & Adi, I. R. Pengaruh Dukungan Sosial dan Resiliensi Terhadap Kualitas Hidup Subjektif Nelayan yang Terdaftar dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayosos)*. 2023. 5(1)
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pradina Pustaka.
- Pane, D. D. P., Tortora, P., Anindito, I. A., Pertamawati, L. H., Wikapusita, T., Ardana, A. K., ... & Rachmanto, U. N. (2021). Blue economy development framework for Indonesia's economic transformation. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS).
- Ratnasari, W. (2023, June). ANALYSIS OF GREEN ECONOMY AND BLUE ECONOMY IMPLEMENTATION TO IMPROVE SMEs AND SUSTAINABLE CREATIVE ECONOMY IN BERAU DISTRICT. In International Conference On Economics Business Management And Accounting (ICOEMA) (Vol. 2, pp. 82-91.)
- Suryawijaya, T. W. E., Utomo, M. T. R. S., Fader, P. S., Putra, F. I. F. S., Wardana, A. A., & Wibowo, M. E. S. (2024). Blue-Marketing Strategy: The Opportunities and Challenges of Big Data Integration in Coastal MSMEs. *International Journal Of Accounting, Management, And Economics Research*, 2(1), 61-80..
- Sungkawati, E. (2024). Opportunities and Challenges: Adopting "Blue-Green Economy" Terms to Achieve SDGs. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 2(1), 01-13.